

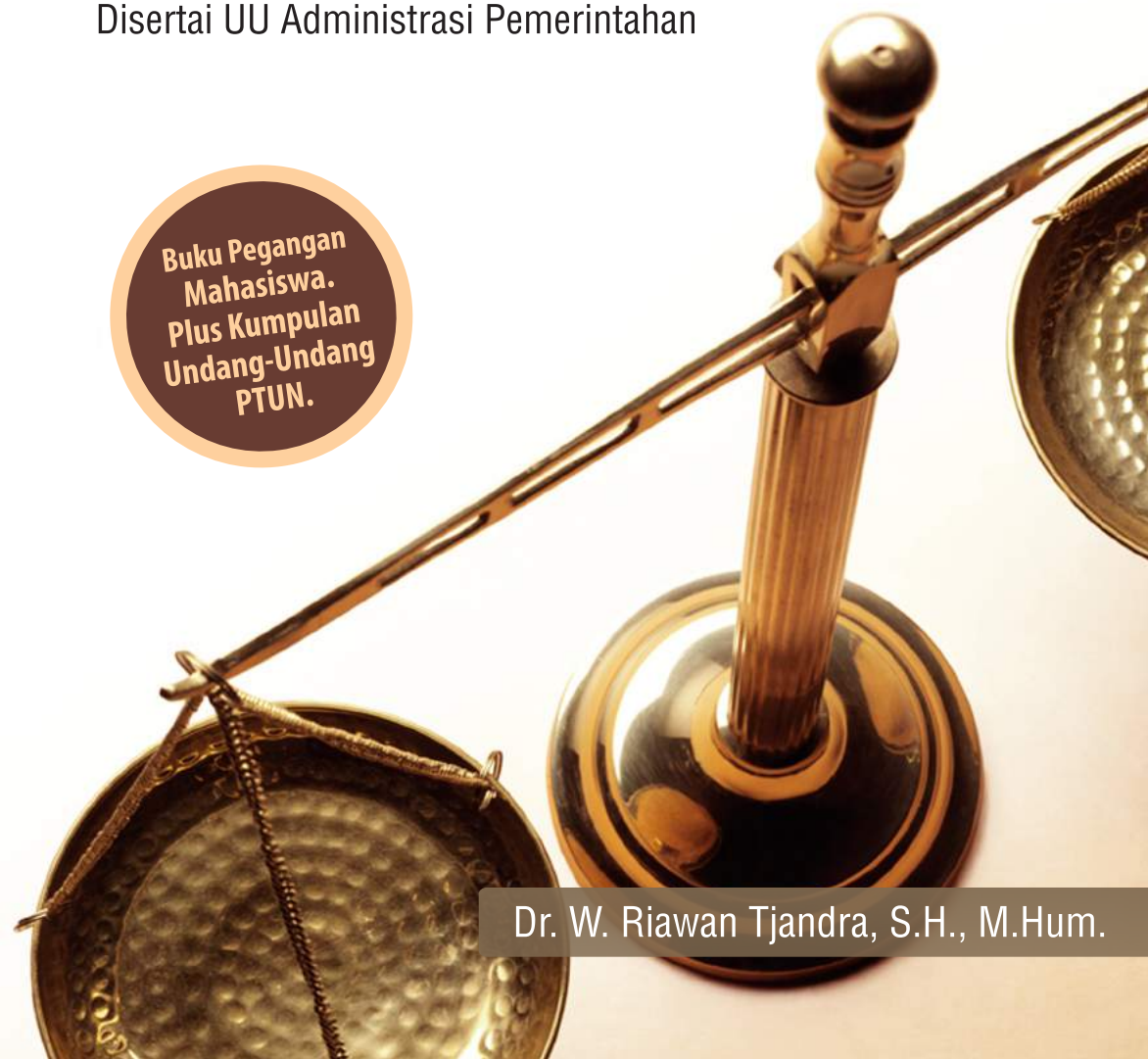
Edisi Revisi

TEORI DAN PRAKTIK **PERADILAN** **TATA USAHA NEGARA**

Disertai UU Administrasi Pemerintahan

Buku Pegangan
Mahasiswa.
Plus Kumpulan
Undang-Undang
PTUN.

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.



TEORI DAN PRAKTIK

PERADILAN

TATA USAHA NEGARA

Edisi Revisi

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

CAHAYA ATMA PUSTAKA

Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara
Edisi Revisi

Oleh : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Hak Cipta © 2015, pada penulis

Hak Publikasi pada Penerbit Cahaya Atma Pustaka

*Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi
dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari penerbit.*

Cetakan ke-	05	04	03	02	01
Tahun	19	18	17	16	15

Cahaya Atma Pustaka

Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jalan Moses Gatotkaca 28 Yogyakarta

Telpon (0274) 561031, 580526, Fax. (0274) 580525

E-mail : cahyaatma@gmail.com

ISBN: 978-602-7821-32-3

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia, maka sesuatu yang amat penting adalah diberikannya perlindungan hukum serta perlindungan hak-hak azasi kepada rakyat Indonesia dari tindakan Pemerintah.

Sarana untuk mencapai keinginan tersebut sudah lama tertanam di hati Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai wakil rakyat Indonesia maupun di hati Pemerintah Republik Indonesia, namun kenyataannya baru dapat diwujudkan pada akhir tahun 1986 dalam ujud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada kesempatan ini dengan kemampuan yang sangat terbatas untuk membantu memperkenalkan kepada khalayak umum termasuk para mahasiswa, telah dicoba untuk menulis suatu buku dengan judul "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" oleh Sdr. W Riawan Tjandra.

Keberhasilan di dalam menulis buku ini, walaupun masih dalam kemampuan tahap awal, tidak terlepas dari bimbingan dan dorongan beberapa pihak. Demikian tulisan ini disajikan dengan segala kekurangannya, oleh karena itu kritik-kritik yang membangun sangat diharapkan. Dan akhir kata mudah-mudahan buku ini dapat memberikan manfaat kepada nusa dan bangsa.

Yogyakarta, Februari 1996
Ketua Bagian HAN
Fakultas Hukum UAJY

Junirahardjo, S.H.

KATA PENGANTAR

(Edisi Revisi)

Tulisan ini merupakan revisi dari cetakan pertama tahun 1995 dalam rangka menyempurnakan tata tulis maupun substansi buku ini. Revisi buku ini dilakukan karena terdapat perkembangan bahan maupun keadaan.

Hal-hal yang disempurnakan dalam revisi buku ini mencakup:

1. Perubahan judul untuk lebih memberikan gambaran mengenai isinya.
2. Penyempurnaan tata tulis.
3. Perluasan substansi penulisan berdasarkan literatur yang relevan.
4. Pengurangan substansi yang sudah tidak relevan dan menghilangkan lampiran karena sebagian besar sudah dimuat dalam tulisan.

Saran-saran dan kritik membangun pembaca yang mulia akan lebih menyempurnakan buku ini untuk terbitan berikutnya.

Semoga buku ini dapat menjadi setetes air di tengah samudra ilmu.

Yogyakarta, Mei 1999
Penulis

KATA PENGANTAR

(edisi revisi)

Tulisan ini merupakan revisi ke-2 dari revisi ke-1 tahun 1999. Hal ini dimaksudkan agar lebih menyempurnakan kualitas isi buku ini. Revisi yang dilakukan dalam buku ini meliputi tata tulis, penambahan lampiran contoh kasus konkret sebagai suatu "academic exercise", dan penambahan bab dalam tulisan. Diucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PBKH) Fakultas Hukum UAJY atas ijin yang diberikan untuk mengakses dan mempresentasikan data penanganan perkara dalam buku ini. Terima kasih pula kepada Kepala Pusat Pemasaran Universitas dan Penerbitan UAIY yang membantu proses revisi buku ini hingga dapat diterbitkan. Semoga, revisi ini dapat melengkapi buku sederhana ini yang tentu saja tidak akan lepas dari kekurangan. Sumbangan pemikiran dari para pembaca yang budiman akan menjadi bahan revisi berikutnya.

Yogyakarta, 4 Februari 2002
Penulis

KATA PENGANTAR

(edisi revisi)

Perkembangan pesat di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai dampak reformasi di segala bidang mengharuskan penyempurnaan isi buku ini. Pada edisi revisi kali ini, meskipun alur penyajian tetap mendekati naskah asli, tetapi telah dilakukan berbagai revisi substantif berupa: penyesuaian isi buku dengan peraturan perundang-undangan terbaru; menambahkan materi-materi baru dalam pembahasan; menata ulang letak dan isi bab, sub bab serta isi buku; pembenahan substansi contoh-contoh praktek peradilan, dan sebagainya.

Revisi buku ini diharapkan dapat menyajikan pembahasan yang lebih holistik sejak dari pendekatan filosofi, teori, historis, sistem sampai pada implementasinya dalam praktek peradilan. Harapannya, pembaca dapat memperoleh kajian yang utuh terhadap perspektif hukum acara peradilan tata usaha negara yang memadukan sisi filosofi, teori dan praktek.

Terima kasih secara istimewa perlu penulis sampaikan kepada inspirator utama dalam penulisan maupun revisi buku ini: Irene Ellyani, S.Sos. (isteri), Fransisca dan Rosa (kedua putri penulis) yang dengan setia mendampingi dan merelakan sebagian waktu kebersamaan dengan penulis tersita, untuk merealisasikan idealisme penulis dalam proses penulisan dan revisi buku ini.

Yogyakarta, November 2005

Penulis

KATA PENGANTAR

(edisi revisi)

Buku ini sebenarnya memiliki jejak pemikiran penulis sejak tahun 1996 dengan penyempurnaan terhadap substansi teori, analisis regulasi dan penyajian sisi-sisi praktik peradilan tata usaha negara. Perkembangan pesat di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai dampak reformasi di segala bidang mengharuskan penyempurnaan isi buku ini. Pada edisi revisi kali ini (2010), meskipun alur penyajian tetap mendekati naskah asli. tetapi telah dilakukan berbagai revisi substantif berupa: penyesuaian isi buku dengan peraturan perundang-undangan terbaru; menambahkan materi-materi baru dalam pembahasan; menata ulang letak dan isi bab, sub bab serta isi buku; pembenahan substansi contoh-contoh praktek peradilan, dan sebagainya.

Revisi buku ini diharapkan dapat menyajikan pembahasan yang lebih holistik sejak dari pendekatan filosofi, teori, historis, sistem sampai pada implementasinya dalam praktek peradilan. Harapannya, pembaca dapat memperoleh kajian yang utuh terhadap perspektif hukum acara peradilan tata usaha negara yang memadukan sisi filosofi, teori dan praktek. Di samping itu, tulisan buku ini telah disesuaikan sejauh mungkin dengan undang-undang yang terbaru di bidang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Guna menyesuaikan dengan perubahan substantif yang dibutuhkan terhadap buku ini, maka diperlukan juga perubahan terhadap judul buku. Semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 21 Januari 2010
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum

PENGANTAR

(edisi revisi)

Buku ini diterbitkan ulang setelah dilakukan beberapa revisi, terutama penyempurnaan tata bahasa dan penggunaan istilah yang berkaitan dengan bidang hukum. Selain itu, pada buku ini juga dilakukan pembaruan undang-undang beserta lampirannya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Semoga buku ini bermanfaat.

Yogyakarta, Februari 2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
KATA PENGANTAR (EDISI REVISI)	v
KATA PENGANTAR (EDISI REVISI)	vii
KATA PENGANTAR (EDISI REVISI)	ix
KATA PENGANTAR (EDISI REVISI)	xi
KATA PENGANTAR (EDISI REVISI)	xiii
BAB I. DASAR-DASAR PERADILAN TATA USAHA NEGARA	1
1. Tujuan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara	1
2. Asas-asas Peradilan Tata Usaha Negara	10
3. Pengertian-pengertian Dasar	12
4. Dasar Hukum	14
5. Susunan dan Kekuasaan Pengadilan	15
BAB II. SUBJEK DAN OBJEK SENGKETA TUN	17
1. Subjek Sengketa Tata Usaha Negara	17
2. Objek Sengketa Tata Usaha Negara	22
BAB III. KOMPETENSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA	35
1. Kompetensi Absolut	35
2. Kompetensi Relatif	36
BAB IV. ALUR PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA	39
1. Upaya Administratif	39
2. Gugatan Langsung melalui Pengadilan Tata Usaha Negara	45

BAB	V. GUGATAN	49
	1. Tenggang Waktu untuk Mengajukan Gugatan	49
	2. Surat Kuasa	51
	3. Perihal Surat Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara	60
	4. Alasan Mengajukan Gugatan (<i>Beroepsgronden</i>)	70
BAB	VI. PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (<i>SCHORSING</i>)	83
	1. Kriteria-kriteria Penundaan Pelaksanaan KTUN	83
	2. Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan	87
BAB	VII. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN	89
	A. Rapat Permusyawaratan (Prosedur Dismisal)	89
	1. Penelitian Segi Administratif	89
	2. Berperkara dengan Cuma-cuma (<i>Prodeo</i>)	92
	3. Hubungan antara Penelitian Segi Administratif Dengan Rapat Permusyawaratan (Prosedur Dismisal)	93
	B. Pemeriksaan Persiapan	95
BAB	VIII. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA BIASA	101
	1. Perihal Ketidakhadiran Penggugat atau Tergugat di Persidangan	102
	2. Perubahan/Pencabutan Gugatan dan Perubahan Jawaban	103
	3. Masuknya Pihak Ketiga dalam Pemeriksaan (Intervensi).. ..	103
	4. Hukum Acara PTUN Tidak Mengenal Rekonvensi	104
	5. Eksepsi	105
	6. Pemeriksaan Sengketa	108
	7. Pembuktian	109
	8. Kesimpulan Para Pihak	117
	9. Asas Keaktifan Hakim (<i>Dominus Litis Beginsel</i>)	118
BAB	IX. PEMERIKSAAN DENGAN ACARA CEPAT DAN ACARA SINGKAT	131
	1. Pemeriksaan dengan Acara Cepat	131
	2. Pemeriksaan dengan Acara Singkat	133
BAB	X. PUTUSAN	135
	1. Proses Memutuskan Sengketa Tata Usaha Negara	135
	2. Elemen-elemen yang Harus Ada pada Putusan	142

BAB	XI.	UPAYA HUKUM	149
	1.	Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	149
	2.	Kasasi	154
	3.	Peninjauan Kembali	159
BAB	XII.	EKSEKUSI	163
BAB	XIII.	HUKUM ADMINISTRASI MATERIIL	171
DAFTAR PUSTAKA			183
LAMPIRAN-LAMPIRAN			188
BIODATA PENULIS			581